



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 18 April 2017

Halaman: 7

Hasan Minta Pemkot Beri Dana BCB

YOGYA, TRIBUN - Keluarga pemilik bangunan cagar budaya (BCB) berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan keberadaan bangunan bersejarah. Pasalnya hingga saat ini, pemerintah dinilai belum maksimal dalam membantu perawatan BCB.

Hasan Widagdo, seorang warga yang memiliki rumah keluarga berupa Ndalem Ropingen di Kotagede mengungkapkan, perhatian pemerintah masih kurang terkait perawatan BCB yang ditetapkan pada 2009 lalu. Dengan penetapan sebagai BCB, kata dia, banyak konsekuensi yang harus diperhatikan, misalnya tak boleh merenovasi apalagi mengubah bangunan inti.

"Seharusnya ada bantuan perawatan dan pemugaran bagi BCB. Sehingga membantu para pemilik BCB untuk merawat," kata anggota Komisi C DPRD Kota Yogya ini, Senin (17/4).

Dia menjelaskan, Ndalem Ropingen yang berada di Purbayan Kotagede tersebut merupakan jenis rumah Jawa

lengkap seluas sekitar 800 meter persegi. Di dalam Ndalem Ropingen terdapat beberapa bangunan, misalnya pendopo model joglo dan terdapat gandok atau bangunan yang berada di sebelah kiri dan kanan.

Secara historis, cerita Hasan, Ndalem Ropingen juga pernah disinggahi presiden pertama Ir Soekarno. Ndalem tersebut diperkirakan dibuat pada akhir tahun 1800-an. Bahkan, saat peluncuran Jogja Kota Batik dunia oleh Gubernur DIY juga digelar di ndalem Ropingen.

Dia menjelaskan, rumah keluarganya yang menjadi BCB ini sudah mendapatkan bantuan perawatan dari Dinas Kebudayaan DIY lewat dana keistimewaan sebesar Rp96 juta pada 2012. Namun, dia berharap bantuan serupa juga bisa diterapkan pada BCB lain.

"Jadi tak sekadar pemotongan pembayaran PBB saja. Adanya bantuan perawatan maupun pemugaran membantu para pemilik BCB," tegasnya.

Politikus PPP itu berharap, sebelum

penetapan BCB oleh pemerintah, harus dijelaskan hak dan kewajiban yang diperoleh pemilik bangunan. Termasuk, terkait renovasi dan jual beli bangunan.

"Jadi pemilik tahu risiko ditetapkan jadi BCB," jelasnya.

Pihaknya pun sudah pernah mendapatkan penawaran dari Pemkot setempat melalui Danais pada 2015 lalu, yakni pembelian yang diajukan tim appraisal ke Pemkot sekitar Rp8 miliar.

Namun, ia menolak tawaran tersebut, karena harga dari tim appraisal tak masuk akal. "Harganya tak masuk akal, pendopo yang masih asli hanya ditaksir Rp130 juta. Sekarang kalau mau buat joglo dengan kualitas kayu yang baik apa cukup segitu," ulasnya.

Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya), Johannes Marbun menilai, pemerintah wajib memberikan perhatian pada pelestarian BCB yang ditetapkan di Kota Yogyakarta. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005